

Kebijakan Ekonomi Jepang Di Blitar Tahun 1942-1945

Denik kharisma Sari, Prof. Nawiyanto, Prof. Nawiyanto
Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: denixkharisma@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kebijakan ekonomi Jepang di Blitar tahun 1942-1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi Blitar sebelum masa pendudukan, bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pertanian dan perkebunan serta bagaimana dampak dari penerapan kebijakan pendudukan Jepang di Blitar. Skripsi ini dikerjakan dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat Blitar. Kebijakan pertanian khususnya padi dengan cara mengenalkan bibit padi baru, mengubah sistem penanaman yang awalnya memakai cara tradisional diganti dengan sistem penanaman modern yaitu sistem larikan, mengupayakan peningkatan kesuburan pertanian dengan menggunakan pupuk kompos. Kebijakan perkebunan pada masa pendudukan Jepang diarahkan pada pengalihan sebagian tanah yang sebelumnya digunakan untuk pertumbuhan tebu yang beralih ke tanaman lain, khususnya padi dan area tanaman kapas dan jarak. Kebijakan yang dijalankan pemerintah militer Jepang di Kabupaten Blitar tidak mencapai sasaran. Kebijakan tersebut berdampak terjadinya kemerosotan kemakmuran terbukti dengan kurangnya bahan pangan dan sandang yang sangat diperlukan oleh rakyat. Penderitaan yang terus menerus dirasakan oleh masyarakat Blitar membawa dampak terjadinya pemberontakan pada tanggal 14 Februari 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa penjajahan Jepang yang terjadi selama tiga setengah tahun sangat menyengsarakan kehidupan rakyat.

Kata kunci: Pendudukan Jepang di Blitar, Kebijakan pertanian dan perkebunan, Pemberontakan PETA.

Abstract

This article discusses the Japan's economic policy in Blitar 1942-1945. The problem in this thesis is how the condition of Blitar before the occupation, how Japan's policy in the field of agriculture and plantations as well as how the impact of the adoption of the Japanese occupation policy in Blitar. This article is done by using the historical method. The results showed that the many changes that occur in society Blitar. The results showed that the many changes that occur in society Blitar . changing cropping systems that originally wore the traditional way is replaced with modern planting systems that bolt system , strive to increase agricultural fertility by using compost. Plantation policies during the Japanese occupation were directed at the transfer of a portion of land previously used for growing sugar cane to switch to other crops, especially rice and cotton crop area and distance. Policies that run the Japanese military government in Blitar did not reach the target. The policy impact of a slump prosperity as evidenced by the lack of food and clothing that are needed by the people. Repeated suffering felt by the people of Blitar impact uprising on February 14, 1945. It can be concluded that the occupation of Japan that occurred during the three and a half years was very devastating to people's lives.

Keywords: Japanese Occupation in Blitar, Agricultural and forestry policies, Rebellion PETA.

Pendahuluan

Ketertarikan Jepang terhadap Indonesia terjadi sejak Perang Dunia I. Di mata Jepang, Indonesia merupakan negara yang kaya secara ekonomi, juga penting dilihat dari segi strategi dan politik. Indonesia sangat berharga bagi Jepang karena kaya akan bahan-bahan mentah, industri seperti minyak, karet, timah, bauksit, nikel dan lain-lain. Di samping itu jumlah penduduk Indonesia yang padat juga sangat baik untuk pemasaran barang-barang hasil industri Jepang.[1]

Pada waktu singkat Angkatan Perang Jepang telah

dapat merebut dan menduduki hampir seluruh wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kemajuan – kemajuan Angkatan Orang Jepang sungguh sangat mengagumkan, dalam waktu singkat hampir seluruh benteng pertahanan Sekutu di Pasifik dan Asia Timur dapat dilumpuhkan dan dihancurkan.[2]

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa penjajahan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Jepang menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun yang membawa perubahan besar. Secara ekonomi mengenai wajib

serah padi, pasar beras bebas dilarang dan petani diharuskan untuk menyerahkan sejumlah tertentu dari hasil panen mereka kepada pemerintah. Wajib serah padi diawali dengan dikeluarkan dekrit di setiap karesidenan dan masing-masing keresidenan diizinkan untuk menerapkan kehendak masing-masing karesidenan. Otonomi semacam itu merupakan salah satu sistem pemasaran Jepang.[3] Secara politik pemerintahan militer Jepang memberi perhatian besar tentang bagaimana mengindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai generasi muda serta memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk berhubungan dengan rakyat di tingkat bawah.[4]

Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Blitar. Pada tahun yang sama istilah *Gementee* Blitar berubah menjadi Blitar *Shi*, dengan luas wilayah 16,1 km², dan berjumlah penduduk sekitar 45.000 jiwa. Perubahan status diperkuat dengan produk hukum yang bernama *Osamu Seirai*. [5] Jepang menjadi penguasa baru di Blitar dan kawasan Indonesia lainnya dan melakukan aturan ketat dalam berbagai bidang. Dalam bidang perekonomian, adanya eksploitasi hasil pertanian termasuk di Blitar, turut mendapat imbas karena sektor pertanian menjadi basis utama mata pencaharian penduduk. Komoditas utama pada masa pendudukan Jepang di Blitar adalah padi, tebu dan jarak. Banyaknya pabrik gula yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Blitar menggambarkan bagaimana produktivitas pertanian dan perkebunan di wilayah ini.[6]

Pendudukan Jepang di Blitar menarik untuk dikaji karena, Blitar telah mengukir catatan sejarah yang sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya pemberontakan PETA. Pemberontakan PETA dipimpin oleh *Shodancho* Supriyadi.[7] Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 merupakan perlawanan yang paling dahsyat atas kependudukan Jepang di Indonesia yang dipicu dari rasa empati serta kepedulian para tentara PETA atas siksaan yang dialami rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang, khususnya penderitaan rakyat di Blitar. Meskipun ada kelompok-kelompok tentara PETA ditempat lain, pemberontakan PETA hanya berlangsung di Blitar.

Beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini, yaitu: (1) Bagaimana kondisi Blitar sebelum pendudukan Jepang? (2) Kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang pertanian, perkebunan dan politik di Blitar pada tahun 1942-1945? (3) Apa dampak dari pendudukan Jepang di Blitar tahun 1942-1945?

Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan kondisi Blitar sebelum pendudukan Jepang. (2) Untuk menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang di Blitar tahun 1942 – 1945. (3) Untuk mengkaji dampak dari pendudukan Jepang di Blitar tahun 1942 - 1945.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan kajian sejarah. Oleh karena itu, metode yang paling tepat digunakan adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottchalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan

peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu pengumpulan sumber-sumber (*heuristik*), kritik sumber (kritik intern dan kritik ekstern), penafsiran sumber (*interpretasi*), dan sintesis sejarah (*historiografi*). [7]

Tahap pertama *heuristik* adalah proses pengumpulan sumber-sumber sejarah sesuai dengan topik yang dikaji. Berkaitan dengan pengumpulan sumber, sumber-sumber tulisan dan lisan dibagi menjadi dua jenis yaitu *sumber primer* dan *sumber sekunder*. *Sumber primer* merupakan kesaksian dari seseorang yang menggunakan pancaindra. Sumber primer yang dipakai dalam skripsi ini antara lain surat kabar pemerintah militer Jepang “*Kan Po*”, arsip daerah dan dokumen-dokumen. Dalam skripsi ini tidak menggunakan sumber lisan seperti wawancara dikarenakan saksi-saksi sejarah tidak ada lagi. Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber yang diperoleh dengan mengumpulkan buku-buku literatur yang sesuai dengan topik. Sumber sekunder yang digunakan dalam tulisan ini meliputi semua bahan yang telah diterbitkan seperti analisis jurnal, laporan penelitian, buku-buku yang ada di perpustakaan, misalnya buku *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV, Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*, dan buku-buku lainnya.[8]

Tahap kedua yaitu kritik *sumber* yaitu proses analisis sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk meneliti keotentikan sumber (keaslian sumber) dengan cara meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan lain-lain. Sedangkan kritik intern digunakan untuk mendapatkan kredibilitas informasi, agar diperoleh tulisan dapat dipercaya sebagai fakta sejarah. [9] Tahap ketiga *interpretasi*, yaitu proses analisis dari data atau fakta-fakta sejarah yang telah didapat. Proses tersebut juga dapat disebut sebagai proses penafsiran informasi sejarah.

Tahap keempat *historiografi* yang merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah. Historiografi yaitu penyusunan fakta-fakta di anggap valid dan kredibel yang diperoleh melalui penelusuran kritik sumber menjadi kisah sejarah yang kronologis dan membentuk kesatuan yang utuh. Penafsiran data diperoleh dari fakta-fakta yang tekumpul dan dihubungkan dengan prinsip 5W+1H yaitu *what* untuk menanyakan siapa pelaku dalam kajian tersebut, *where* untuk menanyakan tempat kejadian, *who* untuk menanyakan siapa pelaku dalam kejadian tersebut, *when* untuk menanyakan kapan peristiwa itu terjadi, *why* untuk menanyakan alasan peristiwa itu terjadi dan untuk mengkritisi apa yang terjadi, *how* untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi.[10]

Hasil Penelitian

Blitar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur. Secara geografis, Blitar terletak pada koordinat

111°40' – 112°10' Bujur Timur dan 7°58' – 8°9'51" Lintang selatan. Posisi ini berada 160 km di sebelah selatan ibu kota Propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Kabupaten Blitar memiliki batas wilayah yang terdiri atas: sebelah Utara adalah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia, sebelah Timur adalah Kabupaten Malang dan di sebelah Barat adalah Kabupaten Tulungagung.[11]

Luas wilayah Kabupaten Blitar pada masa Belanda mencapai 1671 km². Secara administratif wilayah ini dibagi 5 distrik yaitu Blitar, Srengat, Lodoyo, Wlingi dan Gandoesari.[12] Secara umum wilayah Kabupaten Blitar termasuk jenis morfologi pegunungan, perbukitan dan dataran. Secara topografi, Kabupaten Blitar sangat beragam ditunjukkan dengan adanya pegunungan, daerah aliran sungai, maupun pesisir. Kabupaten Blitar merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian ±167 m.dpl. Kabupaten Blitar sebelah utara terdapat dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian 245 m.dpl dengan tingkat kemiringan 2% sampai 40% dengan bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit. Di wilayah utara terdapat pegunungan yaitu Gunung Kombang, Gunung Butak dan Gunung Kelud. Keadaan tanah di wilayah utara lebih subur dibandingkan dengan wilayah selatan.

Wilayah Kabupaten Blitar dibagian tengah, pada umumnya relatif datar dengan ketinggian 175 m.dpl dan mempunyai kemiringan 0% sampai 20%, namun pada bagian sebelah timur sedikit bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2% sampai 15%. Wilayah Kabupaten Blitar sebelah selatan dengan ketinggian 140 m.dpl mempunyai tingkat kemiringan 15% sampai 40%. Wilayah selatan merupakan bagian pesisir dan pegunungan berbatu sehingga struktur tanahnya kurang subur dibandingkan dengan wilayah utara. Di sebelah selatan terdapat pantai yaitu pantai Tambakrejo, Serang dan Jelasutra. Suhu udara di Kabupaten Blitar berkisar antara 28⁰ sampai 29⁰ C dengan tipe iklim C-3, sehingga menjadikan sebagai sebuah kawasan yg beriklim relatif sejuk.[13]

Blitar dialiri beberapa sungai, salah satu sungai yang mengalir di Kabupaten Blitar adalah Sungai Brantas. Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat membagi Kabupaten Blitar menjadi dua, yaitu wilayah Kabupaten Blitar bagian utara dengan luas 898,85 km² dan wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan dengan luas 898,94 km². Di Blitar juga terdapat 3 waduk atau bendungan yaitu bendungan Serut (Lodoyo), bendungan Wlingi Raya dan bendungan Selorejo.

Salah satu gunung yang masih aktif adalah Gunung Kelud dengan ketinggian 1.731 m.dpl. Gunung Kelud adalah salah satu gunung api strato di Pulau Jawa yang terletak di bagian utara Kabupaten Blitar.[14] Daerah Blitar selalu terkena lahar Gunung Kelud yang sudah meletus puluhan kali. Lapisan tanah vulkanik yang banyak ditemukan di Blitar pada dasarnya merupakan hasil pembekuan lahar Gunung Kelud yang telah meletus secara berkala sejak tahun 1331.[15]

Kabupaten Blitar pada masa Belanda termasuk dalam

Keresidenan Kediri, Kabupaten Blitar mempunyai 5 distrik yaitu Srengat, Blitar, Gandoesari, Wlingi dan Lodojo. Pada tahun 1906, Pemerintah kolonial menetapkan Blitar sebagai kotapraja (*Gemeente*) yang memiliki wewenang untuk mengelola sendiri pemerintahannya.[16]

Berdasarkan keputusan pemerintahan kolonial yang mengeluarkan Staatsblad Van Nederlandche Indie Tahun 1906 nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan *Gemeente* Blitar. Sejak perubahan status dari *afdeeling* menjadi *gemeente*, Blitar menjadi pusat pengendalian perkebunan dan industri pengolahan (*manufacture*) yang dikembangkan oleh orang Eropa. Selain itu, *Gemeente* Blitar menjadi pusat penyediaan berbagai kebutuhan perusahaan orang Eropa, baik untuk pengadaan sarana produksi maupun distribusi hasil produksi. Wilayah *Gemeente* Blitar berada di sebelah tenggara *Gemeente* Kediri (ibukota residensi) dan Kabupaten Kediri dengan dipisahkan oleh suatu daerah yang sering dilalui oleh lahar letusan Gunung Kelud, yakni Udanawu, Ponggok, Srengat dan Sanankulon. Di sebelah timur Blitar terhubung dengan Kepanjen dan Malang dan dipisahkan oleh beberapa daerah perbukitan dengan tebing yang relatif curam. Daerah timur juga subur dan banyak diusahakan oleh orang Eropa untuk usaha perkebunan tebu, teh, karet, kelapa, dan singkong.[17]

Kabupaten Blitar pada masa kolonial Belanda termasuk wilayah yang banyak penduduknya. Pada tahun 1920 penduduk Kabupaten Blitar berjumlah 457.261 jiwa. Selama sepuluh tahun penduduk Kabupaten Blitar mengalami peningkatan sebanyak 589.416 jiwa.[18] Berdasarkan latar belakang etnis, penduduk Kabupaten Blitar terdiri dari orang Pribumi, Eropa, Cina, arab dan lain-lain. Dalam hal ini, sebagian besar penduduknya adalah orang pribumi yang terdiri dari orang Jawa dan Madura, keberadaan ketiga suku sangat menonjol dalam bidang pertanian dan sebagian besar tinggal di pedesaan.

Secara ekonomis, mayoritas masyarakat Kabupaten Blitar pada masa kolonial mengandalkan sumber penghasilan dibidang pertanian. Penghasilan masyarakat berasal dari panen padi dan perkebunan – perkebunan yang ada di Kabupaten Blitar. Pada masa Belanda, Tanaman perkebunan yang diusahakan meliputi berbagai jenis tanaman seperti tebu, kopi, teh, kina dan karet. Tanaman pertanian rakyat meliputi tanaman padi dan hortikultural. Pada tahun 1900 perusahaan perkebunan Eropa telah berkembang dengan baik. Di Kabupaten Blitar terdapat 7000 *bau* kebun kopi, 3 perusahaan perkebunan (kopi, kina, karet) dengan tanah hak guna usaha, 2 perkebunan agave, dan 2 perusahaan perkebunan minyak sereh.[19]

Pada bidang sosial khususnya dibidang Pendidikan di Kabupaten Blitar, mempunyai sarana pendidikan terutama untuk golongan pribumi dapat dikatakan baik. Di Kabupaten Blitar mempunyai 164 sekolah desa, 18 di antaranya khusus untuk anak perempuan. Selanjutnya terdapat 1 sekolah desa milik H.V.A di perkebunan “Bondoredjo”, 2 sekolah desa misi Katolik, 36 *standaardschool* di antaranya 11 *vervolgschool*, 1 *standaardschool* milik Zending di desa Maron Srengat dan 2 *kopschool* khusus untuk anak

perempuan. Di kota Blitar terdapat 1 sekolah H.I.S Negeri, 1 H.I.S misi Katolik bersubsidi dan 1 H.I.S yang didirikan oleh perkumpulan Mardi Siswo. Mardi Siswo tidak mempunyai guru yang ahli dan diberi subsidi sebagai *standaardschool*. Bagi golongan Cina di kota blitar tersedia 1 sekolah H.C.S Negeri. Masyarakat Cina juga mendirikan sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan, namun muridnya tidak banyak.[20]

Pembahasan

Bidang pertanian merupakan salah satu fokus utama pemerintah Jepang untuk menopang perekonomian dan pemasok logistik perang. Keadaan pertanian di Blitar tidak berbeda dengan keadaan pertanian di daerah Jawa lainnya. Pertanian rakyat di Kabupaten Blitar terdiri dari beberapa tanaman misalnya, padi, ketela, jarak, tembakau, tebu dan palawija. Padi merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di Kabupaten Blitar karena Kabupaten Blitar merupakan tempat yang subur didukung dengan aliran sungai dari dataran tinggi ke dataran rendah.[21] Untuk itu, pemerintah Jepang mengeluarkan suatu program baru yang digunakan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya penanaman padi. Pada bulan November 1943, pemerintah membuat program yang disebut dengan *Kinkyu Shokuryo Taisaku* adalah tindakan-tindakan yang mendesak mengenai makanan.

Secara umum ada dua cara yang dilakukan pemerintah Jepang dalam meningkatkan produksi padi, yaitu dengan melakukan perluasan penanaman ke areal baru dan meningkatkan produktivitas lahan. Dalam perluasan areal tanaman pangan, pemerintah Jepang mengambil beberapa langkah penting yaitu dengan membuka hutan dan mengubah tanah perkebunan untuk dialihkan menjadi lahan tanaman pangan. dalam meningkatkan produktivitas lahan ialah melalui perbaikan dalam aspek-aspek budidaya tanaman padi baik dari segi teknologi maupun teknik penanaman. Dari segi teknologi, pemerintah pendudukan militer Jepang memperkenalkan beberapa jenis padi baru. Dalam teknik penanaman, Jepang memperkenalkan teknik baru yaitu teknik *larikan*. Teknik larikan ini adalah cara memindahkan bibit tanaman padi pada garis-garis lurus dengan jarak tanam tertentu di antara bibit tersebut. Jarak yang ideal untuk menanam bibit padi ialah 20 cm. Teknik penanaman larikan ini dianggap lebih efektif untuk meningkatkan produksi padi.[22]

Pada awal munculnya jenis padi baru di Kabupaten Blitar mendapat respons kurang baik dari para petani. Para petani masih ragu untuk mengalihkan padi gadu dengan beralih menanam padi baru yang serupa dengan padi cere dengan rasa yang kurang enak. Tujuan utama Jepang ialah mengenalkan jenis padi baru untuk meningkatkan produksi padi bukan kualitas rasa sehingga Jepang tetap menjalankan kebijakannya.

Dalam mendukung pertumbuhan tanaman padi, pemerintah Jepang mendorong para petani di Blitar untuk menggunakan pupuk buatan sendiri yaitu pupuk kompos.

Dalam peningkatan infrastruktur pertanian, Jepang melakukan berbagai cara agar memperoleh hasil pertanian yang mendukung kebutuhan Jepang. Salah satu proyek perluasan areal tanam yaitu dengan adanya irigasi dan drainase. Salah satu proyek drainase di Jawa adalah pembangunan terowongan Neyama di Karesidenan Kediri.

Kebijakan pertanian rakyat yang dijalankan pemerintah pendudukan Jepang tidak berhenti dalam inovasi pertanian, akan tetapi Jepang juga menentukan harga beras, harga beras tersebut ditentukan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang dalam *Maklumat Gunseikan No.2* tentang menetapkan harga beras yang paling mahal.

Propaganda yang dilakukan Jepang dalam meningkatkan produksi pangan yaitu dengan mengadakan perlombaan-perlombaan dalam bidang pertanian perlombaan ini dilakukan tiap karesidenan. Terdapat kebijakan lain yaitu pengalihan areal tanam untuk meningkatkan produksi tanaman baru, misalnya tanaman kapas dan jarak.

Pada tahun 1944, di beberapa keresidenan, pengumpulan padi diperecayakan kepada koperasi-koperasi pertanian yang baru dibentuk. Misalnya di distrik Gandusari desa krisis terbentuk koperasi pertanian, namun kenyataannya hanya dijadikan alasan untuk mengeruk hasil pertanian milik petani di desa krisis. Pada musim panen, petani hanya diberikan sekitar 1/5 bagian dan sisanya diambil oleh pemerintah Jepang.

Mengenai wajib serah padi, padi tersebut diangkut dari lumbung desa ke penggilingan padi yang ditetapkan. Padi biasanya diangkut dengan gerobak. Pada akhir zaman Belanda terdapat 547 penggilingan beras (mesin) di seluruh Jawa, dan terdapat 23 di Keresidenan Kediri termasuk Blitar.[23]

Pemerintah pendudukan Jepang juga menerapkan kebijakan yang tertuang pada undang – undang No. 22/1942 yang menyatakan bahwa *Gunseikan* (kepala pemerintah militer) mempunyai tugas mengawasi perkebunan – perkebunan kopi, kina, karet dan teh. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap perkebunan tersebut diserahkan kepada sebuah badan pengawasan yang bernama *Saibai Kigyo Kanrikodan* (SKKK).[24]

Pada awal bulan Juni 1942 industri gula dikendalikan *Togyo Rengo Kai* (Federasi perkebunan gula Jawa). Pengelolaan industri gula akan dipindahkan keenam perusahaan swasta Jepang. Selama pendudukan Jepang, jumlah pabrik gula adalah 11 yaitu: Koenir, Ngadiredjo, Pesantren, Meritjan, Minggiran, Tegowangi, Kentjong, Poerwoasri, Modjopanggoeng, Lestarie, Djatie.[25] Dengan adanya penurunan jumlah pabrik, dan pengurangan area tanam di Karesidenan Kediri termasuk Kabupaten Blitar juga menurun.

Kebijakan yang diberikan oleh Jepang membawa perubahan bagi penduduk Blitar. Dalam historiografi, pendudukan Jepang, sering disebut era kemerosotan kemakmuran. Produksi pertanian sangat buruk, begitu juga mengenai keadaan sandang pangan. Kemiskinan dan tekanan – tekanan kehidupan yang lebih berat rakyat rasakan dibandingkan kondisi mereka pada masa Belanda.[26]

Penduduk mengalami kurangnya kebutuhan pokok. Bahan makanan sulit didapatkan. Blitar adalah salah satu wilayah yang mengalami kekurangan pangan, penduduk tidak lagi makan seperti biasanya. Mereka hanya bisa makan dengan siput, akar pisang dan tanaman hutan. Kelangkaan pangan ini diindikasikan dengan adanya anjuran pemerintah penduduk Jepang kepada masyarakat untuk mengkonsumsi pangan alternatif karena kurangnya persediaan padi dan mereka yang tinggal di kota bisa mengemis dijalanan.[27] Dampak buruk kebijakan-kebijakan Jepang itulah yang kemudian ikut menyebabkan terjadinya pemberontakan tentara PETA di Blitar. Pemberontakan ini pecah pada tanggal 14 Februari 1945. Memang, Awal kedatangan Jepang di Indonesia disambut antusias penduduk Indonesia termasuk Blitar.

Kesimpulan

Pendudukan Jepang di Kabupaten Blitar membawa perubahan yang besar untuk memahami perubahan tersebut perlu membandingkan Blitar dalam waktu yang berbeda, pada masa Belanda dan masa Jepang. Kabupaten Blitar pada masa Belanda merupakan daerah yang dijadikan sebagai area pertanian maupun perkebunan. Pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Blitar pada masa Belanda meliputi komoditas padi, ketela dan palawija lainnya. Tanaman padi merupakan tanaman pokok, sedangkan ketela menjadi tanaman kedua yang ditanam oleh penduduk Kabupaten Blitar. Untuk tanaman perkebunan komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Blitar adalah tebu, kopi, teh, kina dan karet. Komoditas-komoditas ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar untuk tujuan ekspor.

Pada masa Belanda di Kabupaten Blitar terdapat 43 perkebunan dengan bermacam-macam tanaman dan mempunyai 2 pabrik gula. Dari beberapa perkebunan tersebut, perkebunan gula mampu berkembang dengan baik. Dengan adanya pertanian yang berkembang pesat dan adanya perkebunan-perkebunan komersial tersebut terbuka banyak lapangan pekerjaan baik bagi orang-orang pribumi setempat maupun orang asing. Selain orang pribumi, terdapat juga orang Eropa, Cina dan Arab yang tinggal di Kabupaten Blitar yang ikut mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Namun hal tersebut berubah ketika pemerintah militer Jepang menguasai wilayah Kabupaten Blitar dari tangan pemerintah Belanda.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendudukan pemerintah Jepang di Kabupaten Blitar membawa perubahan dalam sektor pertanian. Untuk mendorong produksi pertanian khususnya padi, pendudukan Jepang mendorong penerapan berbagai inovasi pertanian seperti mengubah sistem penanaman yang awalnya memakai cara tradisional kemudian diganti dengan sistem modern yaitu sistem larikan yang dianggap lebih baik. Selain itu, Jepang juga mengupayakan peningkatan kesuburan tanah pertanian dengan menggunakan pupuk kompos yang

disebabkan pada masa pendudukan Jepang pupuk impor sulit diperoleh. Untuk mendukung infrastruktur pertanian, Jepang melakukan berbagai cara agar memperoleh hasil pertanian yang mendukung kebutuhan Jepang. Infrastruktur pertanian tersebut adalah pembangunan irigasi dan drainase. Untuk mendorong semangat petani dalam meningkatkan produksi pangan, pemerintah Jepang juga melakukan propaganda dengan mengadakan perlombaan pertanian misalnya lomba penanaman dengan model larikan, penggunaan bibit yang seragam pada lahan yang sama.

Dari sisi produksi, sektor pertanian padi, ketela dan palawija mempunyai hasil produksi cukup bagus pada masa Belanda. Namun berbeda pada masa pendudukan Jepang, produksi pertanian mengalami penurunan yang drastis. Penurunan ini disebabkan pemerintah pendudukan militer Jepang menerapkan kebijakan pengurangan lahan pertanian untuk dialihkan menjadi tanaman lain seperti kapas dan jarak karena lebih dibutuhkan oleh pemerintah Jepang guna sebagai minyak pelumas mesin pesawat perang. Penduduk dipaksa untuk menanam pohon jarak di pinggir-pinggir jalan.

Pemerintah Jepang juga menerapkan kebijakan perkebunan di Blitar. Kebijakan tersebut diterapkan dengan mengurangi produksi gula dan melakukan penyitaan industri gula. Industri gula di Blitar selama pendudukan Jepang mengalami kemunduran, terbukti pada masa Belanda terdapat 2 pabrik gula, namun pada masa Jepang hanya terdapat 1 pabrik gula yaitu PG. Koenir. Akibatnya sebagian tanah yang sebelumnya digunakan untuk pertumbuhan tebu yang beralih ke tanaman lain, khususnya beras dan area tanaman kapas dan jarak.

Kebijakan yang dijalankan pemerintah militer Jepang di Kabupaten Blitar tidak mencapai sasaran. Kebijakan tersebut berdampak terjadinya kemerosotan kemakmuran terbukti dengan kurangnya bahan pangan dan sandang yang sangat diperlukan oleh rakyat. Kurangnya kebutuhan pangan sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan rakyat berkaitan dengan kondisi kesehatan rakyat. Oleh karena itu, kurangnya persediaan pangan menjadikan rakyat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan berakibat pada kondisi kesehatan mereka. Selain kekurangan pangan, rakyat juga kekurangan sandang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sandang, rakyat harus menggunakan bahan dari kain goni. Tingginya angka kematian pada masa Jepang disebabkan adanya kemiskinan yang hampir menyeluruh di semua kehidupan ekonomi masyarakat. Kemiskinan ini disebabkan pemerintah pendudukan Jepang mengeksploitasi masyarakat dengan melaksanakan kebijakan – kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi. Kemiskinan terus berlanjut dengan menurunnya kesehatan sehingga mudah terkena berbagai penyakit dan berakhir pada kematian.

Dampak buruk dari pendudukan Jepang di Blitar juga dapat dibuktikan dengan adanya pemberontakan PETA. Munculnya pemberontakan ini disebabkan adanya pemerasan dan penindasan yang dilakukan terhadap penduduk Blitar, perampasan kekayaan alam maupun harta benda yang dilakukan pemerintah Jepang secara tidak

wajar. Masyarakat Blitar di kerahkan untuk melakukan kerja paksa (romusha). Sebab itulah yang menjadikan para penduduk untuk melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Soepriyadi.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan skripsi saya ucapkan berterima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah Sifak dan Ibu Rasminah sebagai tanda cinta kasih yang tiada tara,
2. Adikku tersayang Bella Dwi Permata Sari dan keluarga besar Sukar Nuradin yang selalu memberikan saya motivasi untuk selalu semangat dalam segala hal.
3. Guru-guru dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang telah memberi ilmu dan bimbingan dengan baik.
4. Anakku Kara Nirmala Elyesia, kehadiranmu sungguh membawa perubahan besar dalam hidupku, terimakasih sayang,
5. Fatoni Ma'ruft yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya,
6. Sahabat-sahabatku, sebagai hadiah untuk kesabarannya dan kesetiiaannya menunggu,
7. Almamater tercinta fakultas Sastra Universitas Jember.

Daftar Pustaka

- [1] Sagimun M.D., *Perlawanan Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*, Jakarta: Ombak (2008), hlm. 16.
- [2] Sagimun M.D., *op.cit.*, hlm. 22.
- [3] Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial Di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Grasindo, (1993), hlm. 229.
- [4] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, (2008), hlm. 421.
- [5] Candra Aditya, "Sejarah Blitar" [Online], <http://candradityaa.blogspot.com>, Diunduh pada 3 Februari 2015.
- [6] Bilqis Luciana Zunita, "Kehidupan Petani Pada Masa Penjajahan Jepang 1942-1945 di Kabupaten Blitar" [Online], *Skripsi* dalam <http://bilqis-I-z-fib11.web.unair.ac.id> Diunduh pada 3 Februari 2015.
- [7] Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia (1975), hlm. 32.
- [8] *Ibid.*, hlm. 35.
- [9] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia (1993), hlm. 16.
- [10] Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 18.
- [11] BPS, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2011*, Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar (2011), hlm. 3.
- [12] J. Paulus, *Encyclopedie Van Nederlandschi-Indie*, Martinus Nijhoff (1917), hlm. 315.
- [13] *Ibid.*, hlm. 4. Serta dalam artikel Amilyayu, "Buku Putih Sanitasi 2011: Kabupaten BPS Kabupaten Blitar Bab II Gambaran Umum Kabupaten" [online], <http://www.academia.edu>, diunduh tanggal 8 September 2015
- [14] Muhammad Hasan, "Daftar Gunung Di Jawa Timur" [online] dalam <http://himalaya-adventure.org>, diunduh pada 8 September 2015.
- [15] "Wisata Kabupaten dan Kota Blitar: Candi Penataran" [online] dalam [http:// Eastjava.com](http://Eastjava.com), diunduh pada 8 September 2015.
- [16] Sasmita, *op.cit.*, hlm. 8.
- [17] *Ibid.*, hlm. 45.
- [18] Volkstelling 1930, *Inheemsche Bevolking van Oost-Java*, Batavia: Landsdrukkerij, (1934), hlm. 113.
- [19] Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. CXCVIII.
- [20] *Ibid.*, hlm. CXCIX.
- [21] Bilqis Luciana Zunita, "Kehidupan Petani Pada Masa Penjajahan Jepang 1942-1945 di Kabupaten Blitar" [Online], *Skripsi* dalam <http://bilqis-I-z-fib11.web.unair.ac.id>, Diunduh pada 3 Februari 2015.
- [22] Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 8-9.
- [23] Kurasawa, *op.cit.* Hlm. 80.
- [24] Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*, Yogyakarta: Ombak (2009), hlm. 243.
- [25] T.F.H. Postma, J.W. d'Hane and J.A. Von Meihenfeldt, "De Javasuikeerindustrie Gedurende de Japansche bezetting", *Mededeeling van het Departement van Economische Zaken in Nederlandsch-Indie*, 2 (1946), hlm. 48.
- [26] Nuhfil Hanani & Mangku Purnomo, *Perubahan Struktur Ekonomi Lokal: Studi Dinamika Moda Produksi di Pegunungan Jawa*, Malang: Universitas Brawijaya Press (2010), hlm. 85.
- [27] Pierre Van Der Eng, *A Reconstruction of Population Patterns in Indonesia: 1930 -1961*, Institute of Economic Research Hitotsubashi University (1998), hlm. 4.